

## **UPAYA PEMBERDAYAAN PETANI BAWANG MERAH MELALUI KEBIJAKAN HARGA DI KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Siti Syamsiar**

*Jurusan Sosial Ekonomi/Agribisnis  
Fakultas Pertanian UPN “Veteran” Yogyakarta*

### **Abstract**

*The purpose of this research is to analyze the role of onion price policy that is regulated by regional Government of Bantul regency, Yogyakarta Special Region Province. The Aim of policy is to improve the empowerment of onion farmer in this region. This Study was conducted using the simple random sampling to intake sample of population. The result showed that from 2002-2005 period, peak season of onion production is from April to May. During this period the production has been fluctuating with price range at Rp1.000,-/kg until Rp 1.800,-/kg. The government price policy is higher than the break event point price of onion in Bantul. It means that this policy in this region is effective to increase the onion price market, so that farmers can develop this farm, and finally it could improve the empowerment of onion farmer.*

**Key words:** *empowerment, farmer, onion, price policy*

### **PENDAHULUAN**

Tujuan utama kebijakan pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun daerah yang sedang membangun adalah diarahkan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Kebijakan pertanian ditujukan untuk mensejahterakan petani. Berbagai upaya dilakukan, berbagai masalah diatasi, dan berbagai komoditas dipacu produksinya untuk ditingkatkan perannya dalam mengisi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, namun masih banyak masalah yang belum terselesaikan, dan sampai sekarang ini masih tetap menjadi masalah.

Mengapa seringkali kebijakan pertanian tidak menyelesaikan masalah petani? Kebijakan pemerintah di bidang pertanian tidak hanya dijadikan pedoman atau pegangan dalam proses perencanaan pembangunan pertanian tetapi pelaksanaannya

perlu tindakan nyata, dikawal serta dilakukan pemantauan dan evaluasi, sehingga tepat sasaran, yaitu tercapainya kesejahteraan petani. Tindakan nyata dari kebijakan inilah yang akan mengatasi permasalahan dan meniadakan problem mendasar yang dialami oleh petani, sehingga tercapai kesejahterannya.

Salah satu problem mendasar yang selalu dialami oleh petani adalah turunnya harga hasil pertanian pada saat panen raya, sehingga pembiayaan lebih besar dari penerimaan, akibatnya petani merugi yang pada gilirannya mengganggu keberlanjutan usahanya. Bawang merah adalah salah satu komoditi unggulan di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta yang selalu mengalami masalah mendasar ini pada saat panen raya. Rendahnya harga bawang merah di tingkat petani ini lebih disebabkan karena petani tidak memiliki akses pasar.

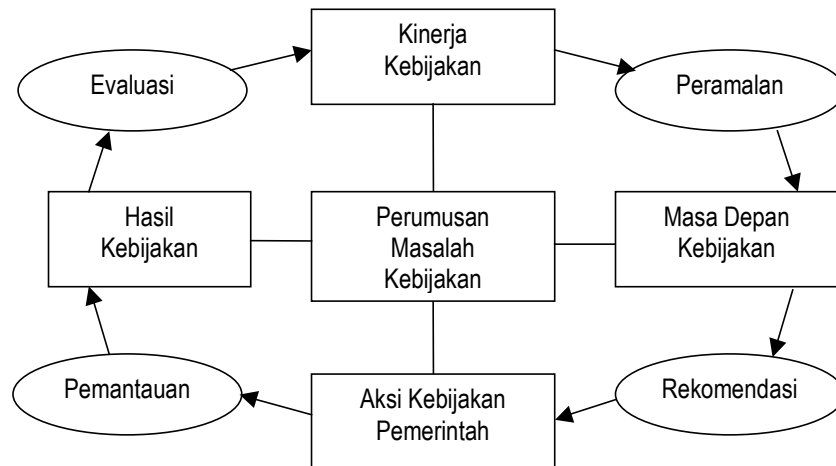
Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk melindungi petani bawang merah pada saat harga rendah adalah dengan Kebijakan Harga melalui diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Nomor 12A Tahun 2003 Tentang Tim dan Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Harga Pasca Panen Hasil Pertanian Komoditi Unggulan Di Kabupaten Bantul. Tujuan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati ini adalah untuk melindungi petani dengan meningkatkan harga komoditi unggulan pada saat panen raya. Harga jual bawang merah yang rendah di saat panen raya selalu berada dibawah titik impas, sehingga petani merugi. Cara yang dilakukan adalah dengan pembelian bawang merah diatas harga titik impas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, maka petani bawang merah memperoleh keuntungan usaha, sehingga dapat melanjutkan usaha berikutnya. Kebijakan harga bawang merah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta ini pada gilirannya merupakan pem-

berdayaan terhadap petani bawang merah. Penelitian ini akan mengkaji penerapan kebijakan harga bawang merah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memberikan pemberdayaan kepada petani bawang merah.

**KERANGKA TEORI**

**Kebijakan Publik**

Menurut Dunn (2003), untuk menentukan sebuah kebijakan, perlu tersedia informasi yang berguna, berupa lima tipe kebijakan yaitu masalah kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan, kinerja kebijakan, dan masa depan kebijakan. Untuk penerapan kebijakan diperlukan prosedur analisis kebijakan berupa perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan dan penilaian. Kebijakan dan penerapan kebijakan, merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan berkesinambungan, dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1:** Kebijakan dan Penerapan Kebijakan yang Berorientasi Masalah  
 Sumber: Dunn (2003)

Gambar 1 tersebut dapat dipergunakan untuk menjelaskan, kebijakan harga dan penerapan kebijakan harga bawang merah agar dapat menyelesaikan masalah rendahnya harga bawang merah pada saat panen raya di tingkat petani, apabila aksi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bantul dikawal melalui pemantauan hasil kebijakan, kemudian dievaluasi untuk mengetahui kinerja kebijakan harga bawang merah. Kinerja kebijakan digunakan untuk peramalan periode berikutnya, guna penentuan masa depan kebijakan, kemudian menjadi dasar rekomendasi. Kesenambungan antara kebijakan dan penerapan kebijakan akan dapat memberikan solusi yang tepat terhadap penyelesaian masalah yang tepat pula. Penelitian ini mengkaji penerapan kebijakan harga berupa pemantauan dan evaluasi untuk mengetahui kinerja kebijakan harga bawang merah dalam memberdayakan petani bawang merah di Kabupaten Bantul.

### **Kebijakan Harga**

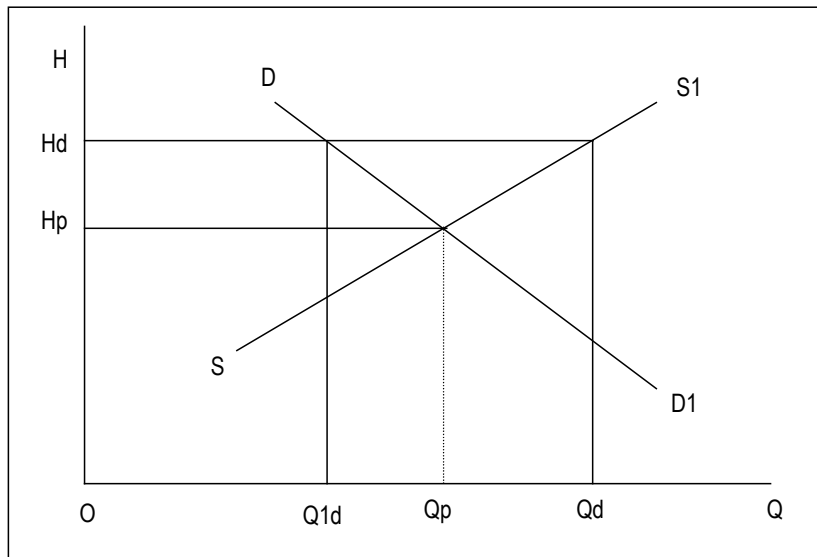
Kebijakan harga merupakan salah satu kebijakan publik disektor ekonomi pertanian sebagai bentuk turut campur-tangannya pemerintah untuk melindungi petani dan menstabilkan perekonomian (Arifin, B. 2001). Pada saat panen raya, terjadi lonjakan produksi, dan bila permintaan tetap maka harga akan turun. Harga merupakan salah satu faktor yang sulit dikendalikan oleh petani. Dasar penetapan harga bawang merah adalah hubungan antara input dengan output dalam proses produksi komoditi bawang merah. Kebijakan penetapan harga dasar ini hendaknya sudah diatas harga titik impas atau *Break Event Point (BEP)*, sehingga petani tetap memperoleh

keuntungan usaha. Kebijakan harga dasar ini harus diikuti dengan penampungan produk bawang merah oleh pemerintah. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi lonjakan penawaran yang berlebihan sehingga harga bawang merah tertekan.

Secara teoritis hukum ekonomi menyatakan bila penawaran meningkat dan permintaan tetap maka harga akan turun (Nicholson, 2000). Dalam kondisi seperti ini perlu dilakukan kebijakan dengan meningkatkan harga dasar menjadi lebih tinggi dari harga pasar. Misalkan harga pasar adalah  $H_p$  dan harga dasar adalah  $H_d$ , maka  $H_d$  lebih besar daripada  $H_p$ . Untuk menjaga harga dasar tetap berlaku, maka pemerintah harus ikut ambil bagian dalam pasar dengan menampung kelebihan produksi, sehingga penawaran dan permintaan tetap seimbang dan harga tidak terpengaruh. Dengan kata lain, pasar dikehendaki bekerja pada harga dasar.

Hubungan antara besarnya produksi yang diminta masyarakat dengan harga pasar dan harga dasar dengan produksi yang dibeli oleh pemerintah dapat dilihat pada Gambar 2.

Pada Gambar 2 menunjukkan OQp adalah besarnya produksi yang diminta masyarakat pada harga pasar ( $H_p$ ), yang berada di bawah harga dasar ( $H_d$ ). Bila harga dasar tetap berlaku, maka jumlah permintaan adalah sebesar  $OQ1d$ . Bila dikehendaki harga dasar dapat berfungsi dengan baik, maka pemerintah harus menampung dan membeli kelebihan produksi sebesar  $Q1dQd$ . Dengan demikian permintaan yang sebenarnya dapat diimbangi oleh produksi, yaitu sebesar  $OQ1d$ .



**Gambar 2:** Kebijakan Harga yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mengatasi kelebihan produksi pada saat panen raya.

### Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan (*empowerment*) merupakan hasil kerja dari proses interaktif baik ditingkat ideologis maupun praksis. Ditingkat ideologis, konsep pemberdayaan merupakan hasil interaksi antara konsep *top-down* dan *bottom-up*, antara *growth strategy* dan *people-centered strategy*, sedangkan ditingkat praksis, terjadi lewat otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat, dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung. Sebagai titik fokusnya adalah lokalitas, karena pemberdayaan dapat berlangsung melalui issue-issue lokal. Konsep pemberdayaan sekaligus mengandung konteks pemihakan kepada lapisan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan (Sumodiningrat, 2001). Dalam penelitian ini pemberdayaan merupakan bentuk interaksi antara petani bawang merah dengan pemerintah daerah Kabupaten Bantul melalui kebijakan harga, sehingga petani bawang merah dalam tataran praksis dapat memperoleh keuntungan usaha, dan pada gilirannya

dapat melakukan pengambilan keputusan bagi usaha yang berkelanjutan.

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena.

Metode pelaksanaan penelitian menggunakan survei. Pemilihan daerah penelitian dilakukan secara *purposive* karena kabupaten inilah satu-satunya di Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta yang melakukan secara nyata pembelian hasil panen bawang merah dari para petani bawang merahnya.

Pengambilan petani sampel dilakukan secara *simple random sampling* sehingga setiap unit sampling yang terdapat dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk terambil sebagai sampel. Diambil dari petani bawang merah yang ada di Kecamatan Sanden, Desa Srigading sebagai daerah sentra produksi bawang merah di Kabupaten Bantul. Sejumlah 33 orang petani bawang merah terambil sebagai sampel.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Produksi bawang merah dan harga terendah yang terjadi pada saat panen raya dari tahun ke tahun berfluktuasi, data ditunjukkan pada Tabel 1. Tahun 2002 panen raya bawang merah terjadi pada bulan April. Produksi melimpah dan harga bawang merah di tingkat petani turun sampai dengan Rp 1.000,00/kg, saat itu belum ada Tim Pasca Panen. Tahun 2003 panen raya terjadi di bulan Mei dengan harga terendah Rp 1.700,00/kg, pada tahun 2003 ini baru ada Tim Pasca Panen. Pada tahun 2004 dan 2005

panen raya terjadi sama-sama pada bulan April, dengan harga terendah Rp 1.800,00 naik sedikit dibandingkan tahun 2003, namun mengalami penurunan lagi di tahun 2005 menjadi Rp 1.700,00/kg.

Pada saat terjadi harga terendah inilah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melaksanakan kebijakan harga dengan melakukan pembelian bawang merah langsung kepada petani, melalui Tim Pasca Panen. Tim Pasca Panen sebagai pelaksana kebijakan harga bawang merah, melakukan kegiatan pembelian melalui tahapan sebagai berikut:

1. Memasuki masa panen raya, tim melakukan pengecekan harga bawang merah di lapangan.
2. Adanya laporan dari pihak petani bawang merah, bahwa harga turun.
3. Rapat koordinasi di tingkat kabupaten untuk pengambilan keputusan harga beli bawang merah.
4. Melakukan pembelian kepada petani bawang merah.

Harga pembelian, jumlah pembelian dan dana yang dikeluarkan oleh tim pasca panen dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 1:** Produksi dan Harga Terendah Bawang Merah Di Kabupaten Bantul Tahun 2002 – 2005.

Tahun	Produksi (kg)	Harga terendah(Rp/kg)	Periode panen bulan
2002	23.168.450	1.000,00	April
2003	21.667.300	1.700,00	Mei
2004	14.300.100	1.800,00	April
2005	21.037.600	1.700,00	April

Sumber: Tim Pasca Panen, Tahun 2002-2005.

**Tabel 2:** Harga beli, Jumlah Pembelian dan Dana yang dikeluarkan oleh Tim Pasca Panen Tahun 2002 -2005

Tahun	Harga Beli (Rp/kg)	Jumlah Pembelian (kg)	Dana yang dikeluarkan (Rp)
2002	2.100,00	69.500	145.950.000,00
2003	2.000,00	65.750	131.500.000,00
2004	2.100,00	59.860	125.706.000,00
2005	2.000,00	67.000	134.000.000,00

Sumber: Tim Pasca Panen, Tahun 2002-2005.

Data dalam Tabel 2 ini menunjukkan konsistensi Tim Pasca Panen dari tahun 2002 sampai dengan 2005 dalam melaksanakan pembelian bawang merah langsung kepada petani, dengan kisaran harga beli antara Rp 2000,00/kg –Rp 2.100,00/kg dan alokasi dana berkisar seratus dua puluh lima juta rupiah sampai seratus empat puluh lima juta rupiah.

**Pemantauan**

Pemantauan perlu dilakukan untuk mengawal penerapan kebijakan harga, bahwa harga beli yang dilakukan oleh Tim Pasca Panen sudah diatas harga titik impas bawang merah dan mempertimbangkan pula harga keseimbangan pada waktu panen raya bawang merah. Penentuan pembelian bawang merah berdasarkan harga titik impas dan harga keseimbangan dari tahun 2002 sampai tahun 2005, dapat dilihat pada Tabel 3.

Berdasarkan hasil penelitian, data dalam Tabel 3 menunjukkan harga beli Tim Pasca Panen yang dilakukan oleh Tim Pasca Panen sebagai pelaksana kebijakan harga, telah melakukan pembelian diatas harga titik impas bawang merah dan memperhatikan harga keseimbangan yang terjadi pada saat panen raya dari tahun 2002 sampai 2005.

Pemantauan hasil survei kepada petani bawang merah, selain penentuan titik impas juga menunjukkan pembelian bawang merah ditingkat petani sesuai dengan harga beli yang ditetapkan pada periode yang bersangkutan.

**Evaluasi**

Perlu dilakukan evaluasi dari hasil kerja Tim Pasca Panen, untuk mengkaji kinerja kebijakan harga dalam pemberdayaan petani bawang merah sehingga harga jual bawang merah di tingkat petani meningkat diatas harga titik impas, utamanya dalam meningkatkan harga bawang merah di pasar, sehingga sasaran untuk melindungi petani bawang merah benar-benar tercapai. Hasil penelitian menunjukkan Tim Pasca Panen bekerja selama satu bulan pada saat panen raya yaitu di bulan April atau Mei pada tahun yang bersangkutan dapat meningkatkan harga di pasar untuk bulan-bulan berikutnya. Hasil kinerja kebijakan harga bawang merah ditunjukkan oleh keadaan harga setelah pembelian bawang merah berupa peningkatan harga, dapat dilihat pada Tabel 4.

**Tabel 3:** Harga Titik Impas, Harga Keseimbangan Dan Harga Beli yang dilakukan oleh Tim Pasca Panen Tahun 2002 -2005.

No.	Tahun	Harga Titik Impas (Rp/kg)	Harga Keseimbangan (Rp/kg)	Harga beli (Rp/kg)
1.	2002	1.891,22	1.708,18	2.100,00
2.	2003	1.944,10	1.659,75	2.000,00
3.	2004	1.944,10	1.892,84	2.100,00
4.	2005	1.965,20	1.896,65	2.000,00

Sumber: Data terolah dan Tim Pasca Panen Kabupaten Bantul

**Tabel 4:** Keadaan Harga Bawang Merah Tiap Bulan Di Kabupaten Bantul Tahun 2002 sampai 2005.

No	Bulan	HargaTh 2002 (Rp/kg)	Harga Th 2003 (Rp/kg)	HargaTh 2004 (Rp/kg)	HargaTh 2005 (Rp/kg)
1	Januari	3.000,00	3.500,00	4.500,00	4.000,00
2	Februari	2.750,00	3.000,00	4.000,00	3.500,00
3	Maret	2.500,00	3.000,00	3.400,00	3.000,00
4	April	1.000,00	2.250,00	1.800,00	1.700,00
5	Mei	1.500,00	1.700,00	2.250,00	2.250,00
6	Juni	2.400,00	2.300,00	2.000,00	2.100,00
7	Juli	2.450,00	2.000,00	2.000,00	2.250,00
8	Agustus	2.000,00	2.250,00	2.500,00	2.500,00
9	September	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
10	Oktober	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
11	Nopember	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	Desember	3.500,00	4.500,00	4.000,00	4.500,00

Sumber: Statistik Kabupaten Bantul ,Tahun 2002 – 2005.

Untuk bulan April tahun 2002 harga bawang merah terendah adalah sebesar Rp 1.000,00/kg, di bulan Mei 2002 menjadi Rp 1.500,00/kg. Pada saat itu Tim Pasca Panen belum ada sehingga belum melaksanakan pembelian bawang merah kepada petani. Harga yang terjadi adalah harga pasar. Kenaikan harga bulan Juni menjadi Rp 2.400,00/kg dan mencapai harga tertinggi di bulan Desember 2002, yaitu sebesar Rp 3.500,00/kg.

Pada tahun 2003 harga terendah terjadi di bulan Mei yaitu sebesar Rp 1700,00/kg. Setelah dilakukan pembelian bawang merah oleh Tim Pasca Panen maka harga meningkat di bulan berikutnya yaitu Juni harga menjadi Rp 2.300,00/kg dan di bulan Desember 2003 mencapai harga tertinggi yaitu Rp 4.500,00/kg. Tahun 2004 harga terendah terjadi pada bulan April yaitu sebesar Rp 1.800,00/kg. Setelah dilakukan pembelian bawang merah oleh Tim Pasca Panen, di bulan berikutnya harga meningkat menjadi Rp 2.250,00/kg dan mencapai Rp 4.000,00/kg di bulan Desember tahun 2004. Pada tahun 2005 harga terendah terjadi di bulan April yaitu sebesar Rp 1.700,00/kg dan setelah dilakukan pembelian bawang merah oleh Tim Pasca Panen maka harga

bawang merah di bulan berikutnya Mei 2005 meningkat menjadi Rp 2.300,00/kg serta di bulan Desember 2005 mencapai harga Rp 4.000,00/kg.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan harga yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, dapat meningkatkan harga di pasar sehingga petani bawang merah dapat menikmati harga jual bawang merah yang baik, dan pada gilirannya petani dapat melangsungkan usahanya serta tujuan untuk pemberdayaan petani bawang merah dapat tercapai.

#### **PENUTUP**

Kinerja kebijakan harga bawang merah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul mencapai sasarannya yaitu memberikan pemberdayaan kepada petani bawang merah, sehingga dapat secara mandiri melanjutkan usahanya.

Upaya pemberdayaan petani bawang merah melalui kebijakan harga oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dapat lebih meningkat kinerjanya bila dilanjutkan dengan peramalan guna penentuan masa depan kebijakan, dengan merujuk pada informasi kinerja yang telah ada.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Arifin, Bustanul (2001). *Spektrum Kebijakan Pertanian Indonesia*. Telaah Struktur, Kasus Dan Alternatif Strategi. Jakarta: Erlangga.
- Bechtold, Karl-Heinz (1998). *Politik Dan Kebijaksanaan Pembangunan Pertanian*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Daniel, Moebar (2002). *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta. PT Bumi Aksara.
- Dunn, William N (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Ke-Dua. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Hutabarat, Nelson P. (2001). *Menyongsong Hari Krida Pertanian Ke-29 Tahun 2001*. Sinar Tani No. 2899 Tahun XXXI, 27 Juni-3 Juli 2001.
- Kasrino, Faisal (2001). *Meningkatkan Pemanfaatan Sumber Daya Pertanian dan Pengembangan Sistem Usaha Pertanian Menuju Era Globalisasi Ekonomi*.
- Makalah dalam Prosiding Agrobisnis Dinamika Sumber Daya dan Pengembangan Sistem Usaha Pertanian. Jakarta. Badan Litbang Pertanian.
- Mubyarto (1995). *Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan*. Jakarta: Sinar Harapan.
- \_\_\_\_\_. (1994). *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Cetakan keempat. Jakarta. LP3ES.
- Nicholson, Walter (2000). *Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions*. The Dryden Press.
- Saragih, Bungaran (2001). *Membangun Kembali Perekonomian Indonesia Melalui Pembangunan Sistem Agrobisnis*. Jakarta. Sinar Tani No. 2898 Tahun XXXI, 20-26 Juni 2001.
- Sumodiningrat, Gunawan (2001). *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar bekerjasama dengan IDEA.